

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Total Aset

Didalam variabel total aset ini dibagi menjadi dua yaitu aktiva berwujud dan tidak berwujud. Disini variabel yang digunakan oleh peneliti adalah aktiva berwujud. Aktiva berwujud adalah aktiva yang memiliki bentuk fisik dan digunakan dalam operasi normal perusahaan, serta aktiva tersebut mempunyai kegunaan dalam operasi normal perusahaan, dan juga mempunyai kegunaan yang permanen (Buku Akuntansi Dasar, Modul).

Karakteristik aktiva tetap berwujud :

1. Memiliki bentuk fisik
2. Digunakan secara aktif dalam kegiatan normal perusahaan
3. Dimiliki, tidak diinvestasikan dan tidak diperdagangkan
4. Memiliki jangka waktu kegunaan (umur) relatif permanen (lebih dari satu periode lebih dari satu tahun
5. Memberikan manfaat dimasa yang akan datang

Contoh aktiva tetap berwujud berupa : tanah, bangunan, mesin dan alat-alat pabrik; mebel dan alat-alat kantor; kendaraan dan alat-alat transportasi.

A. Aktiva tetap berwujud dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu:

1. Aktiva tetap yang masa kegunaannya tidak terbatas.

Golongan ini tidak akan ada penyusutan harga perolehannya, dikarenakan manfaatnya tidak akan berkurang dalam menjalankan fungsinya selama periode waktu yang tidak terbatas.

Contoh: tanah untuk bangunan (rumah, pabrik, kantor) dan tanah untuk pertanian

2. Aktiva tetap yang masa kegunaannya terbatas.

Golongan ini akan ada penyusutan, dikarenakan manfaat yang diberikan dalam menjalankan fungsinya semakin berkurang atau terbatas jangka waktunya, maka harga aktiva ini akan menyusut selama masa kegunaannya.

Contoh : bangunan, mesin, dan alat-alat pabrik; mebel, dan alat-alat kantor; kendaraan dan alat-alat transport.

3. Aktiva tetap yang kegunaannya terbatas.

Golongan ini akan ada penyusutan dan bahkan tidak dapat diganti dengan aktiva sejenis apabila masa kegunaannya sudah habis.

Contoh : sumber alam; tambang atau hutan.

Pengeksploitasi sumber daya alam akan menyebabkan sumber daya alam tersebut habis, sehingga sumber daya alam harus dialokasikan dengan baik dalam periode-periode tertentu agar tidak langsung habis dan memperoleh manfaatnya secara efisien.

B. Akuntansi dalam aktiva tetap secara umum dapat di bagi atas tiga hal, yaitu:

1. Akuntansi saat perolehan (accounting for acquisition of plant assets)

Aktiva yang harus dicatat sesuai harga perolehannya. Yang meliputi seluruh pengeluaran yang diperlukan untuk mendapatkan aktiva, serta pengeluaran lainnya agar aktiva siap digunakan. Harga diukur dengan uang yang dibayarkan pada suatu transaksi secara tunai.

Penerapan prinsip harga perolehan untuk aktiva tetap:

a. Tanah

Harga perolehan tanah meliputi:

1. Harga beli tunai tanah
2. Biaya balik nama
3. Komisi perantara
4. Pajak dan pungutan lain yang harus dibayar pembeli

b. Perbaikan Tanah

Harga perolehan perbaikan tanah meliputi semua pengeluaran yang dilakukan sampai perbaikan siap untuk digunakan.

c. Gedung

Bila gedung dimiliki oleh pembeli maka, harga perolehannya meliputi; harga beli, biaya notaris, dan komisi perantara. Tapi bila gedung dibangun sendiri, harga perolehannya meliputi;

semua pengeluaran untuk membuat gedung, termasuk ijin mendirikan bangunan, instalasi listrik dan air.

d. Peralatan

Harga perolehannya terdiri dari: harga beli tunai, biaya pengangkutan, dan biaya asuransi selama dalam pengangkutan.

Termasuk juga pengeluaran untuk balik nama kendaraan.

2. Akuntansi saat penggunaan (accounting for usage of plant assets)

Proses penggunaan harga perolehan aktiva tetap menjadi biaya selama manfaatnya dengan cara yang rasional dan sistematis.

Proses ini ada proses penggunaan aktiva bukan proses penilaian aktiva.

3. Akuntansi saat pelepasan (accounting for disposal of plant assets)

Pelepasan aktiva tetap terjadi pada saat aktiva tetap belum habis masa manfaatnya maupun pada saat masa manfaatnya sudah habis.

Ketika aktiva tetap sudah dilepas masa manfaatnya berarti saat penghentian aktiva tetap tersebut telah disusutkan secara penuh.

2. Liquid Asset

Likuid asset merupakan uang tunai atau aset lain yang dapat segera diuangkan sehingga operasional usaha akan terus berjalan, termasuk adanya jumlah barang dagangan, maupun aset yang dapat diuangkan selama satu tahun atau lebih (Financial Soundness Indicators, BI). Aset likuid terbagi menjadi dua yaitu:

a. Liquid assets to total assets (liquid asset ratio)

Merupakan indikator untuk mengukur alat liquid yang tersedia agar memenuhi kebutuhan penarikan secara tunai, baik itu yang terduga maupun tidak terduga. Level kemampuan rasio ini untuk meredam adanya goncangan yang dapat mempengaruhi neraca. Alat liquid itu sendiri berupa uang tunai dan aset lain yang dapat segera diuangkan, sehingga operasional usahanya akan tetap berjalan.

b. Liquid asset to short-term liabilities

Merupakan indikator ini masuk ke dalam rasio aset liquid untuk melihat adanya pengelolaan likuiditas disisi aset dan kewajiban. Indikator ini dapat dijadikan indikator kemampuan bank agar memenuhi kewajiban adanya penarikan dana jangka pendek tanpa menimbulkan masalah likuiditas.

3. Social Security (Jaminan Sosial)

Menurut ILO (International Labour Organization) jaminan sosial merupakan salah satu dari Badan PBB, secara luas Jaminan Sosial adalah sistem perlindungan yang diberikan oleh masyarakat kepada warganya, melalui beberapa usaha untuk menghadapi resiko-resiko ekonomi atau sosial yang dapat membuat berkurang atau berhentinya penghasilan (Husni, 2003: 53). Sistem Jaminan Sosial yang diberlakukan di Indonesia yaitu Sistem Jaminan Siosial Nasional (SJSN). Dimana Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) ini diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan juga asas keadilan sosial bagi seluruh

rakyat Indonesia. Sistem Jaminan Sosial Nasional mempunyai tujuan untuk memberikan jaminan agar terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi masyarakat. Yang utamanya adalah sebuah bidang dari kesejahteraan sosial yang memperhatikan perlindungan sosial, atau perlindungan terhadap kondisi sosial seperti kemiskinan, usia lanjut, kecacatan dan juga pengangguran.

Jenis-Jenis Program Jaminan Sosial

Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 jenis-jenis program dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yaitu:

1. Jaminan Kesehatan

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Pasal 19 adalah:

Jaminanan kesehatan berdasrkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Jaminan kesehatan bertujuan untuk menjamin masyarakat agar memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Menurut pasal 20, disebutkan bahwa peserta jaminan kesehatan adalah:

- a. Setiap orang harus membayar iuran atau iuran dibayarkan oleh Pemerintah.
- b. Seluruh anggota keluarga peserta berhak menerima manfaat dari jaminan kesehatan.
- c. Dengan penambahan iuran maka peserta dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang lainnya.

Dalam pasal 22 tentang jaminan kesehatan disebutkan:

- a. Jaminan kesehatan bersifat pelayanan perorangan yang berupa kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, termasuk obat dan juga bahan medis habis pakai yang diperlukan.
- b. Untuk jenis pelayanan yang disalahgunakan, peserta akan dikenai denda.

Manfaat kesehatan dalam pasal 22 Pemerintah diberikan fasilitas kesehatan yang menjalin kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Maka dalam keadaan darurat peserta dapat menggunakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) langsung ke fasilitas kesehatan yang bekerjasama langsung dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial juga mengembangkan sistem pelayanan kesehatan, sistem kendali mutu pelayanan dan sistem pembayaran pelayanan, kesehatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

2. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 pasal 29 menyebutkan:

- a. Jaminan kecelakaan kerja (JKK) diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial.
- b. Seseorang yang sudah membayar iuran wajib mendapatkan Jaminan Kecelakaan Kerja.

Dijelaskan lebih rinci pada Pasal 31 tentang kepesertaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yaitu:

- a. Bagi peserta yang mengalami kecelakaan kerja berhak mendapat manfaat berupa pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat kecelakaan kerja dan mendapatkan manfaat yang berupa uang tunai apabila terjadi cacat permanen atau meninggal dunia.
- b. Manfaat jaminan kecelakaan kerja yang berupa uang tunai diberikan sekaligus kepada ahli waris dari pekerja yang meninggal dunia atau pekerja yang mengalami cacat akan dilihat sesuai dengan tingkat kecacatannya.
- c. Untuk jenis pelayanan dan kecelakaan tertentu, pemberi kerja dikenakan biaya iuran.

Pada pasal 34, disebutkan bahwa:

- a. Besarnya iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) sesuai dengan persentase dari upah atau penghasilan yang ditanggung seluruhnya oleh pemberi kerja.
- b. Besarnya iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) bagi peserta yang tidak menerima upah adalah jumlah nominal yang sudah ditetapkan secara berkala oleh pemerintah.
- c. Besarnya iuran bervariasi yang diterima oleh kelompok tergantung dengan resiko kerja yang terjadi.

3. Jaminan Hari Tua (JHT)

Jaminan Hari Tua (JHT) diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib. Jaminan Hari Tua (JHT) bertujuan untuk menjamin agar peserta yang menerima uang tunai apabila memang sudah memasuki masa pensiun, mengalami cacat total, ataupun meninggal dunia. Peserta Jaminan Hari Tua (JHT) adalah peserta yang sudah membayar iuran. Pasal 37 menyebutkan bahwa:

- a. Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) berupa uang tunai yang dibayarkan sekaligus saat peserta memang sudah memasuki usia pensiun meninggal dunia, atau mengalami cacat total.
- b. Besarnya manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) berdasarkan seluruh akumulasi iuran yang sudah disetorkan ditambah dengan hasil pengembangannya.
- c. Pembayaran manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) dapat diberikan sebagian sampai batas tertentu disaat kepesertaan mencapai minimal 10 (sepuluh) tahun.
- d. Apabila ada peserta yang meninggal dunia, ahli waris yang sah berhak menerima manfaat Jaminan Hari Tua (JHT).
- e. Ketentuan pada bagian (c) dan (d) sudah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Peserta program Jaminan Hari Tua (JHT) terdiri atas peserta Penerima Upah (PU) dan peserta Bukan Penerima Upah

(BPU). Untuk peserta Penerima Upah (PU) ditetapkan berdasarkan persentase dari upah yang dilaporkan. Sedangkan untuk iuran Jaminan Hari Tua (JHT) untuk Tenaga Kerja di Luar Hubungan Kerja (TK-LHK) atau pekerja msndiri atau peserta Bukan penerima Upah (BPU) ialah iuran opsional, artinya peserta akan bebas memilih berapa besarnya mereka akan membayar iuran, disesuaikan dengan dasar upah masing-masing. Dan pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri, wajib mengikuti program Jaminan Hari Tua (JHT) (PP No.109 Tahun 2013 Pasal 8 Ayat 2).

4. Jaminan Pensiun

Jaminan Pensiun (JP) diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi dan tabungan wajib, jaminan Pensiun (JP) bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan ataupun berkurang penghasilannya karena sudah memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total. Jaminan Pensiun (JP) diselenggrakan berdasarkan manfaat pasti, dimana usia pensiun ditetapkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Peserta jaminan Pensiun (JP) merupakan pekerja yang sudah membayar iuran (Undang-Undang No.40 Tahun 2004 Pasal 40).

Pada pasal 41 Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang manfaat Jaminan Pensiun (JP) adalah:

- a. Manfaat Jaminan Pensiun (JP berwujud uang tunai dan akan diterima setiap bulan.

- b. Setiap peserta atau ahli warisnya berhak mendapat pembayaran uang pensiun berkala setiap bulan setelah memenuhi masa iuran selama 15 (lima belas) tahun.
- c. Manfaat Jaminan Pensiun (JP) dibayarkan kepada peserta yang sudah mencapai usia pensiun sesuai aturan yang sudah ditetapkan.
- d. Apabila peserta meninggal dunia pada masa ke 15 (lima belas) tahun, ahli warisnya berhak mendapatkan Jaminan Pensiun (JP).
- e. Apabila peserta mencapai usia pensiun sebelum memenuhi masa 15 (lima belas) tahun, peserta berhak mendapatkan seluruh akumulasi iurannya ditambah dengan perkembangannya.
- f. Hak ahli waris atas manfaat pensiun anak berakhir apabila anak tersebut sudah menikah, sudah bekerja tetap, dan sudah mencapai umur 23 (dua puluh tiga tahun).
- g. Manfaat pensiun cacat dibayar kepada peserta yang mengalami cacat tetap meskipun belum mencapai usia pensiun.

Besarnya iuran Jaminan Pensiun (JP) untuk peserta penerima upah ditentukan berdasarkan dengan persentase tertentu dari upah atau penghasilan atau suatu jumlah nominal tertentu yang ditanggung bersama oleh pemberi kerja dan pekerja.

5. Jaminan Kematian (JK)

Jaminan Kematian (JK) diselenggarakan berdasarkan prinsip sosial dan asuransi. Jaminan Kematian (JK) bertujuan memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris

peserta yang sudah meninggal dunia. Peserta Jaminan Kematian adalah setian orang yang sudah membayar iuran. Manfaat Jaminan Kematian (JK) berada pada pasal 45 Undang-Undang No.40 Tahun 2004 yaitu:

- a. Manfaat Jaminan Kematian(JK) berupa uang tunai dan dibayarkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah disetujui oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
- b. Besarnya manfaat Jaminan Kematian (JK) ditetapkan berdasarkan suatu jumlah nominal tertentu.

Iuran Jaminan Kematian ditanggung oleh pemberi kerja. Besarnya iuran Jaminan Kematian (JK) bagi peserta ditentukan berdasarkan persentase tertentu dari upah atau penghasilan peserta. Serta besarnya iuran Jaminan Kematian (JK) bagi peserta yang bukan penerima upah ditentukan berdasarkan jumlah nominal tertentu yang sudah dibayar oleh peserta.

4. Manajemen Bencana

Bencana adalah rangkaian peristiwa yang mengancam serta mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh alam maupun non alam serta adanya unsur manusia didalamnya, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, rusaknya lingkungan, kerugian fisik berupa rumah dan harta benda, serta dampak yang paling berat adalah dampak psikologis (UU No.24 Tahun 2007). Bencana dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu bencana alam, bencana non alam dan juga bencana

sosial. Definisi sesuai penjelasan diatas dibedakan menjadi 3 (tiga) aspek dasar yaitu:

1. Terjadinya peristiwa atau gangguan terhadap masyarakat.
2. Adanya suatu peristiwa atau gangguan tersebut membahayakan kehidupan masyarakat.
3. Melibatkan adanya korban, dan tidak mempunya masyarakat untuk mengatasi sumberdaya mereka.

Manajemen menurut Priyono, Pengantar Manajemen (2007) adalah sebuah seni untuk menyelesaikan pekerjaan melalui peran dari orang lain. Artinya bahwa manajer dalam mencapai tujuan organisasi memerlukan peran dari orang lain untuk berbagi tugas yang diperlukan dalam sebuah pekerjaan. Manajemen sebagai seni adalah kemampuan dari seorang manajer merupakan bakat alami atau dasar dari orang itu sendiri. Dalam penentuan keputusan seorang manajer menggunakan pendekatan ilmiah, sedangkan aspek lain yang menyangkut unsur manusia seperti kepemimpinan dan perencanaan menggunakan pendekatan artistik atau seni.

Manajemen Bencana adalah suatu ilmu terapan yang mengobservasi secara sistematis dan analisi bencana untuk meningkatkan tindakan-tindakan mitigasi (pengurangan) dan preventive (pencegahan) serta respon darurat dan pemulihan (Carter, 1991). Neil Grigg mengatakan fase utama dan fungsi pengelolaan atau manajemen bencana dalam manajemen secara umum meliputi :

- a. Perencanaan (planning) meliputi: (1) identifikasi bencana dan tujuan pengelolaan bencana yang ditargetkan; (2) pengumpulan data primer dan sekunder; (3) menentukan metode yang akan digunakan; (4) Investigasi, analisis kajian; (5) menentukan jalan keluar dari berbagai alternative. Keberhasilan dari sebuah proses dengan mempersiapkan perencanaan yang jelas dan terarah.
- b. Pengorganisasian (organising) dimana organising adalah sebuah pengaturan dalam pembagian tugas dan kewajiban semua orang yang masuk dalam organisasi.
- c. Kepemimpinan (directing). Ini lebih menonjol kearah aspek-aspek Leadership. Pembinaan dan pengarahan kepemimpinan dalam pengelolaan bencana merupakan posisi yang penting karena akan ada pengaruh dalam semua aspek kepemimpinan dalam pengelolaan bencana.
- d. Pengkoordinasian (coordinating) merupakan upaya agar menyatukan sumberdaya manusia (SDM) supaya bisa ikut berkontribusi secara menyeluruh dalam suatu kegiatan sehingga dapat memastikan SDM bekerja dengan benar.
- e. Pengendalian (controlling) merupakan upaya untuk mengontrol dan mengawasi SDM terhadap semua kegiatan yang ada. Manfaatnya adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi waktu, ruang dan juga biaya untuk meningkatkan kegiatan baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Berfungsi juga untuk melihat kerja dari sebuah kegiatan,

dan untuk menekan kerugian sekecil mungkin dan juga untuk menyesuaikan perubahan situasi dan kondisinya.

- f. Pengawasan (supervising) berfungsi untuk memastikan SDM bekerja dengan tugas dan wewenangnya. Dan berfungsi juga untuk memastikan suatu proses yang sudah berjalan harus sesuai dengan target dan sasarannya.
- g. Keuangan (financing) harus dilakukannya penganggaran, dengan sudah dilakukannya penganggaran maka akan dapat dilakukan prnrntuan program kerja yang mempunyai manfaat.

Manajemen bencana ada berbagai tahap, meliputi:

1. Pencegahan dan Mitigasi

Upaya pencegahan dan mitigasi dilakukan karena dengan tujuan menghindari terjadinya bencana dan juga mengurangi adanya resiko yang ditimbulkan dari sebuah bencana. Tindakan mitigasi menurut sifatnya dibedakan menjadi dua, yaitu

- a. Tindakan pencegahan yang termasuk dalam mitigasi aktif
 - 1. Pembuatan dan penempatan tanda-tanda bahaya, agar tidak memasuki kawasan rawan bencana.
 - 2. Pemandahan penduduk dari daerah rawan bencana ke daerah yang lebih aman.
 - 3. Pelatihan dasar tentang bahaya bencana kepada masyarakat.
 - 4. Pengawasan tentang tata ruang mendirikan bangunan didaerah rawan bencana.

5. Perencanaan daerah evakuasi untuk pemukiman sementara (pengungsian) pada saat terjadi bencana.
 6. Pembuatan bangunan yang berfungsi sebagai pencegahan, pengamanan dan pengurangan dampak yang ditimbulkan oleh bencana alam.
 7. Penyuluhan mengenai kewaspadaan terhadap bencana alam kepada masyarakat.
- b. Tindakan pencegahan yang termasuk ke dalam mitigasi pasif:
1. Penyusunan peraturan perundang-undangan.
 2. Pembuatan peta rawan bencana.
 3. Pembuatan standar prosedur.
 4. Pembuatan brosur tentang bencana alam.
 5. Penelitian mengenai karakteristik bencana.
 6. Analisis resiko bencana.
 7. Pembuatan organisasi untuk tugas bencana.
 8. Adanya sebuah forum ke masyarakat.
 9. Perencanaan pembangunan
2. Kesiapsiagaan

Kesiapsiagaan merupakan kegiatan penyuluhan, pelatihan serta memberikan pendidikan kepada masyarakat dan petugas dilapangan maupun aparat pemerintah dan juga perlu dilakukannya pelatihan ketrampilan dan kewaspadaan terhadap suatu proses bencana (Sutanto, 2010). Kesiapsiagaan dilakukan untuk mengantisipasi

terjadinya bencana yang dapat menjatuhkan korban jiwa, kerusakan, kerugian harta benda, dan berubahnya tatanan kehidupan masyarakat. Upaya yang perlu dilakukan saat bencana mulai diidentifikasi akan terjadi, dan kegiatan yang dilakukan yaitu:

1. Pengaktifan pos-pos siaga bencana dan saran pendukung.
 2. Pelatihan siaga atau simulasi bagi setiap sektor penanggulangan bencana.
 3. Inventarisasi sumberdaya pendukung.
 4. Penyiapan dukungan sumberdaya.
 5. Penyiapan sistem informasi dan komunikasi yang tepat untuk mendukung tugas kebencanaan.
 6. Penyusunan rencana kontijensi.
 7. Mobilitas sumberdaya.
3. Tanggap Darurat

Tanggap darurat merupakan tahap penggerakan pertolongan terhadap masyarakat yang sedang tertimpa untuk meminimalisir bertambahnya korban jiwa. Menurut PRRPB 2008 penyelenggaraan penanggulangan bencana saat tanggap darurat meliputi:

1. Pengkajian secara tepat dan tepat terhadap kerusakan yang berada di lokasi bencana.
2. Penentuan status keadaan darurat bencana.
3. Penyelamatan dan evakuasi terhadap korban bencana.
4. Pemenuhan kebutuhan dasar.

5. Perlindungan kepada masyarakat rentan.
 6. Pemulihan dengan cepat sarana dan prasarana vital.
4. Pemulihan

Pemulihan merupakan kegiatan untuk membangun kembali semua kerusakan yang disebabkan oleh bencana alam supaya lebih baik dari keadaan sebelum terjadinya bencana serta dapat digunakan kembali dengan selayaknya. Tahap pemulihan terhadap tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Tahap rehabilitasi meliputi:

- a. Perbaikan lingkungan disekitar daerah yang terkena bencana.
- b. Perbaikan sarana umum.
- c. Pemulihan aspek sosial dan psikologis kepada masyarakat.
- d. Pelayanan kesehatan.
- e. Pemberian bantuan berupa makanan dan juga alat kesehatan.
- f. Pemulihan sektor ekonomi dan budaya.
- g. Pemulihan fungsi pemerintahan dan layanan publik.

Sedangkan tahap rekonstruksi merupakan pembangunan kembali sarana dan prasarana yang rusak karena bencana alam secara lebih baik dari sebelum terjadi bencana dan pembangunannya akan dilakukan persiapan dan perencanaan yang matang oleh para ahli dan sektor terkait;

- a. Pembangunan kembali sarana dan prasarana.
- b. Peningkatan kondisi sosial ekonomi dan budaya.
- c. Peningkatan layanan yang utama dalam masyarakat.

- d. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat.
- e. Partisipasi dan peran serta lembaga organisasi kemasyarakatan yang lebih baik setelah bencana.

Dalam melaksanakan penanggulangan bencana, ,maka meliputi tahap-tahap yaitu:

- a. Tahap prabencana
- b. Saat tanggap darurat
- c. Pasca bencana

Adapun penjelasan tahap-tahap melaksanakan penanggulangan bencana sebagai berikut:

- a. Tahap Prabencana

Menurut BNPB, tahap ini meliputi 2 (dua) keadaan yaitu:

- 1. Situasi tidak terjadi bencana

Situasi ini adalah dimana wilayah yang biasanya masuk ke dalam zona rawan bencana pada waktu tertentu sama sekali tidak terkena atau menghadapi ancaman bencana yang nyata. Bentuk penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana, yaitu:

- a. Perencanaan penanggulangan bencana
- b. Pengurangan resiko bencana
- c. Pencegahan
- d. Pemaduan dalam perencanaan pembangunan
- e. Persyaratan analisis resiko bencana

- f. Pelaksanaan rencana tata ruang
 - g. Pendidikan dan pelatihan
 - h. Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana
2. Situasi terdapat potensi bencana

Perlu adanya kegiatan dalam situasi ini, adanya kesiap-siagaan dan mitigasi dini untuk menghadapi dan menanggulangi bencana.

b. Saat Tanggap Darurat

Penyelenggaraan penanggulangan saat dalam situasi tanggap darurat meliputi:

1. Penentuan status keadaan darurat bencana
2. Pemenuhan kebutuhan dasar
3. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana.
4. Perlindungan terhadap kelompok rentan
5. Pemulihan sarana dan prasarana penting
6. Pengkajian secara tepat dan cepat terhadap kerusakan yang diakibatkan oleh terjadinya bencana.

c. Pasca Bencana

Penyelenggaraan penanggulangan pada tahap pasca bencana, yaitu dilakukannya rehabilitasi dan rekonstruksi.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Chatarina Rusmiyati, dkk (2012)	Penanganan Dampak Sosial Psikologis Korban Bencana Merapi	Bersifat deskriptif kualitatif. Sumbernya korban Merapi. Dengan mengarah pada penanganan dampak psikologis korban bencana Merapi.	Bencana berdampak pada psikologis dari masyarakat yang menjadi korban bencana Merapi, dimana mereka membutuhkan kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal dan pelayanan kesehatan.	Terdapat pada objek yang diteliti dimana objek yang diteliti adalah para petani yang berada di Desa Wonokerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman.
2.	Rais, dkk (2010)	Analisis Sistem Manajemen Resiko Bencana Dengan Menggunakan Sistem Informasi Geografi	Menggunakan Sistem informasi geografis, yang mengarah pada manajemen resiko bencana kondisi geografis tempat terjadinya bencana.	Teknik informasi Geografi digunakan untuk manajemen bencana yang difokuskan pada relief, penanggulangan bencana, rehabilitasi dan perbaikan, serta penyampaian informasi lokasi bencana, tipe bencana dan waktu bencana.	Terdapat pada objek penelitian dimana mengarah pada manajemen bencana petani yang berada di Desa Wonokerto kecamatan Turi Sleman dengan menggunakan <i>content analysis</i> .

No	Nama	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
3.	Christiana Yuni Kusmiati (2005)	Menuju Perbaikan Penanggulangan Bencana Di Indonesia	Menggunakan analisis data manajemen penanggulangan bencana di Indonesia.	Pengusutan mitigasi bencana dalam rencana pembangunan nasional, serta penyusunan instrumen kebijakan sebagai dasar penyusunan index resiko bencana.	Objek penelitian mengarah pada petani di Desa Wonokerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman yang menjadi korban bencana erupsi Gunung Merapi dengan menggunakan <i>content analysis</i> .
4.	Renny Febrin (2016)	Peran Pemerintah Kabupaten Karo Dalam Penanggulangan Bencana Alam Erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo Sumatra Utara Tahun 2013-2015	Dengan metode penelitian kualitatif deskriptif	Penghambat pemerintah kabupaten Karo dalam penanggulangan bencana adalah standar operasional yang belum jelas, koordinasi yang kurang baik, kurangnya persediaan obat-obatan dan seringnya pengungsi meninggalkan posko dalam waktu yang lama.	Objek penelitian berada di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman dan dengan menggunakan <i>content analysis</i> .

No	Nama	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
5.	Rosalina Kumalawati (2014)	Dampak Banjir Lahar Pasca Erupsi Gunung Merapi 2010 pada Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kali Putih Kabupaten Magelang	Menggunakan metode analisis kuantitatif dan kualitatif yang terdiri atas data statistik yang dikumpulkan dari instansi-instansi pemerintah di Kabupaten Magelang.	Banjir lahar pasca erupsi Gunung Merapi 2010 mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat karena rusaknya mata pencaharian masyarakat dan sektor pertambangan yang menjadi pembangkit perekonomian masyarakat daerah bencana serta adanya sektor pariwisata yang terbentuk akibat adanya bencana.	Objek penelitian berada di Desa Wonokerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman yang merupakan daerah Kawasan Rawan Bencana II Gunung Merapi dengan menggunakan metode <i>content analysis</i> .
6.	Anantasia Ratna Wahyu Wijayanti (2013)	Perubahan Pekerjaan Masyarakat Sebagai Akibat dari Bencana Studi Kasus: Kawasan Wisata <i>Volcano Tour</i> Gunung Merapi, Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman	Menggunakan semi-etnografi kepada masyarakat yang merupakan korban bencana erupsi Merapi secara langsung dan melihat kondisi yang ada di Desa Umbulharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman.	Bencana berdampak pada perubahan pekerjaan masyarakat karena masyarakat yang kehilangan pekerjaan mampu memanfaatkan peluang kerja di tempat lain sebagai sumber penghidupan baru.	Objek penelitian adalah petani yang berada di Desa Wonokerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman dengan menggunakan metode <i>content analysis</i> .

No	Nama	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
7.	Shanti Emawati, dkk (2012)	Efektivitas Model Pelatihan Ketrampilan berbasis Usaha Pertanian-Peternakan Terpadu Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi di Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali	Menggunakan metode analisis uji <i>Wilcoxon Match Pairs Test</i> .	Dengan membandingkan hasil <i>protest</i> dan <i>prosttest</i> pada tiga aspek yaitu aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap menunjukkan hasil yang signifikan, dengan kesimpulan pelatihan ketrampilan usaha pertanian-peternakan terpadu di Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali efektif memberdayakan petani peternak.	Objek penietian ditujukan kepada petani yang berada di Desa Wonokerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman dengan menggunakan <i>content analysis</i> .
8.	Nyak Ilham (2011)	Dampak Bencana Merapi Terhadap Usaha Sapi Perah Di Kabupaten Sleman	Dengan metode analisis deskriptif terhadap peternak sapi perah yang berada di Kabupaten Sleman.	Dampak terjadinya letusan Gunung Merapi mengakibatkan adanya keterikatan budaya yang kuat sehingga peternak di wilayah Merapi tidak mau dipindahkan ke daerah lain, namun dampaknya produksi susu sapi perah di Kabupaten Sleman turun, kerugian ekonomi tersebut disebabkan karena ternak sapi mengalami kematian yang cukup tinggi.	Objek penelitian ditujukan kepada petani salak yang berada di Desa Wonokerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman dengan menggunakan metode <i>content analysis</i> .

No	Nama	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
9.	Zaenal Fatoni dan Donald E. Steward (2012)	Sanitation in an Emergency Situation: A case study of the Eruption Of Mt Merapi, Indonesia	Dengan menggunakan analisis deskriptif komulatif kepada masyarakat yang menjadi korban di daerah Gunung Merapi	Mencari hal yang kritis, yang terkadang tidak terlihat oleh masyarakat apa yang dapat menjadi pedoman untuk bertahan hidup setelah terjadi bencana letusan Gunung Merapi pada tahun 2010	Objek penelitian ditujukan kepada petani di Desa Wonokerto yang termasuk dalam kawan rawan bencana II Gunung Merapi
10.	Sakamoto et.al (2016)	Analysis of the Evacuation Planning Process for Kuchinoerabujima Volcano Eruption	Dengan metode observasi langsung, menganalisis kegiatan dan masyarakat sipil	Tata kelola bencana telah beralih dari yang dulu ke sekarang menuju yang lebih baik dan adanya kolaborasi dengan masyarakat setelah letusan.	Perbedaannya berada pada objek penelitian, dimana penelitian ditujukan ke petani yang berada di Desa Wonokerto Turi Sleman